



PEMKAB TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2024

[http: kec-
suruh.trenggalekkab.go.id](http://kec-suruh.trenggalekkab.go.id)

[suruhtrenggalek@
gmail.com](mailto:suruhtrenggalek@gmail.com)

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SURUH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program, kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan Bupati.

Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Pergeseran keadaan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Dasar pertimbangan disusunnya perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diantaranya adalah karena terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

Secara ringkas, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah karena:

1. Penggunaan SILPA tahun 2023;
2. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja;
3. Perlunya penambahan dana untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024; dan
4. Percepatan target capaian program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 perlu dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum yang definitif.

Prinsip- Prinsip didalam penyusunan Perubahan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan , sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tahun 2024.
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang diusun kedalam Rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun- tahun sebelumnya.
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan, tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat, menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan

Perubahan Renja PD, serta mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Selaras dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang didukung dengan Perubahan Renja-PD tahun 2024, maka sesuai amanat tersebut Kecamatan Suruh menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengoperasionalkan RKPD lebih fokus dan terarah, disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Keuangan 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan *Daerah Provinsi Jawa Timur* Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah *Provinsi Jawa Timur* Tahun 2011—2031;
- t. Peraturan *Daerah Provinsi Jawa Timur* Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- z. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- aa. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 46).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2024 adalah untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengperasionalkan RKPD lebih fokus dan terarah, disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2024 yaitu:

1. Sebagai acuan Kecamatan Suruh dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Menyempurnakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Suruh agar lebih fokus dan terarah sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2024 adalah:

1. Hasil evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar rekening dan/ atau kegiatan serta penambahan/ pengurangan jenis belanja.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan Perubahan RKPD membawa konsekuensi kepada setiap Perangkat Daerah untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja). Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2024 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2024 disusun dan merujuk pada Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah **“Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem ”**.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang mendukung Tema Pembangunan Tahun 2024 ada 3 (tiga) Prioritas yaitu:

- 1) Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat;
- 3) Ekonomi kerakyatan dan jarring pengaman sosial.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2024 disusun dengan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/ menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Dilengkapi dengan matriks **format (terlampir)**.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penamabahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja.

Dilengkapi dengan kertas kerja matriks sesuai dengan **hasil entry dari aplikasi SIPD**.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal- hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan pada sebelum perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II Tahun 2024, maka pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 tidak ada penambahan anggaran akan tetapi ada pergeseran anggaran antar sub kegiatan yang tidak memengaruhi kinerja OPD.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Suruh dari Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada dasarnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Adapun gambaran terhadap capaian kinerja Kecamatan Suruh sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

Tabel Matrik Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	Kecamatan								
70.101	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	98,82	100	42,62	42,62	141,44	141,44
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	171,4	100	55,24	55,24	226,64	226,64
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	98,82	100	97,64	97,64	196,46	196,46

7.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36	67	61	26	42,62	93	258,33
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22	15	3	20	25	250
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	45	46	23	50	68	262
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	441	100	62,77	62,77	503,77	503,77
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	16	16	15	93,75	31	182
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	45	50	31	62	76	152
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	347	345	292	140	47,95	485	140

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	38	35	38	18	47,37	53	139
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100	29	100	25,93	25,93	54,93	54,93
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27	29	27	7	25,93	36	133
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	0	100	37,74	37,74	37,74	37,74
	Pendataan dan Pengolahan Administ rasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59	0	53	20	37,74	20	34
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	30	100	37,5	37,50	67,50	67,50
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2	4	0	0,00	2	50
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	1	25,00	5	125
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6	150

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6	150
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	4	4	2	50,00	6	150
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	6	50,00	18	150
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	1	100	1	1,00	2,00	2,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100,00	2	200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	93	100	51,28	51,28	144,28	144,28
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	36	18	50,00	54	150
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	4	0	0,00	10	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	13	6	46,15	19	146
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	17	100	19,19	19,19	36,19	36,19

	Daerah								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	11	3	27,27	14	127
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	6	6	2	33,33	8	18
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100	92,86	92,86	192,86	192,86
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun (dokumen)	12	2	2	2	100,00	4,00	33,33
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2	2	2	100,00	4	200
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12	24	12	6	50,00	30,00	250,00

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12	12	12	6	50,00	18	150
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	12	6	50,00	18	150
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	100	0	0,00	100	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	12	3	2	0	0,00	3,00	25,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12	3	2	0	0,00	3	25
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	100	100	50	50,00	150	150,00
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12	15	12	42,86	357,17	57,86	482,17

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50,00	18	150
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	3	2	0	0,00	3	25
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100	100	50	50,00	150	15000,00
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12	56	24	12	50,00	68,00	566,67
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45	23	12	6	50,00	29	64
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49	33	12	6	50,00	39	80

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/ rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan Bupati. Dengan adanya Perubahan RKPD tersebut maka harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap perkembangan keadaan yang diantaranya meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 5) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Program dan Kegiatan Belanja pada APBD Perubahan

Pada APBD Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Suruh Mengampu 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan, yang kesemuanya diharapkan dapat mencapai kinerja 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan dan Perubahan RKPD Tahun 2024		
		Target Kinerja	Satuan Kinerja	Pagu anggaran
KECAMATAN SURUH				2.255.659.524
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2.177.666.569
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100	%	
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,64	%	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	62	dokumen	1.730.176
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	16	Dokumen	953.470
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46	laporan	776.706
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	2.007.388.132
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/bulan	1.964.282.224
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	Dokumen	42.780.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291	dokumen	91.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	laporan	234.408
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100	%	801.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29	laporan	801.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	%	441.225
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59	dokumen	441.225
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	65.555.391
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	2.800.777
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	4.057.969
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	2.576.362
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	1.520.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	paket	20.592.735
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	33.566.323
Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	12	laporan	441.225
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	%	10.679.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10.679.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	%	49.722.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	15.860.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	laporan	2.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	31.612.800

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	41.348.845
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	37.918.445
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	3.430.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	%	54.947.839
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2	dokumen	21.801.350
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	laporan	21.801.350
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24	dokumen	33.146.489
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12	dokumen	1.921.569
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	31.224.920
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	%	5.698.849

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	2	laporan	5.698.849
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2	laporan	5.698.849
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100	%	9.923.792
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	14	laporan	9.923.792
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	8.292.701
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	1.631.091
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100	%	7.422.475
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24	dokumen	7.422.475
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	3.413.733
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	4.008.742

Sejalan dengan Tema Pembangunan Trenggalek Tahun 2024 adalah adalah **“Melestarikan Lingkungan, Mendekatkan Pelayanan Dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem ”**. Yang dilaksanakan dengan 2 (dua) prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek yaitu :

- a) Infrastruktur berwawasan lingkungan disertai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat;
- c) Ekonomi kerakyatan dan jarring pengaman sosial.

Pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 maka program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada **kertas kerja matrik sesuai dengan hasil entry dari aplikasi SIPD seperti pada table di bawah ini.**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Suruh Tahun 2024
Kabupaten Trenggalek

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif RKPD	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kecamatan Suruh							2.283.305.961	2.283.305.961	2.255.659.524	0		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;	100,00 %	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;	100,00 %	2.154.394.361	2.154.394.361	2.123.908.548	-2.839.376	PAD	
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100,00 %	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,64%	49.188.469	49.188.469	52.027.845	2.839.376	PAD	
				Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	1.730.176	1.730.176	1.730.176	0	PAD	

X.XX.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	61 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	62 dokumen	1.730.176	1.730.176	1.730.176	0	PA D	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	953.470	953.470	953.470	0	PA D	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 laporan	776.706	776.706	776.706	0	PA D	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	2.046.103.386	2.046.103.386	2.007.388.132	-1.083.725		

X.XX.1. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ perbulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ perbulan	2.001.928.661	2.001.928.661	1.964.282.224	0	DAU	
X.XX.1. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dokumen	42.780.000	42.780.000	42.780.000	0	PAD	
X.XX.1. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	292 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291 dokumen	953.500	953.500	91.500	-862.000	PAD	
X.XX.1. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 laporan	441.225	441.225	234.408	-221.725	PAD	

X.XX.01 .2.03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100%	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100%	953.54 4	953.54 4	801.00 0	-152.544	PA D	
X.XX.01 .2.03.06	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29 laporan	953.54 4	953.54 4	801.00 0	-152.544	PA D	
X.XX.01 .2.05.2	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	441.22 5	441.22 5	441.22 5	0	PA D	
X.XX.01 .2.05.3	Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59 dokume n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59 dokume n	441.22 5	441.22 5	441.22 5	0	PA D	
X.XX.1. 2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	57.213. 406	57.213. 406	65.555. 391	-1.603.107	PA D	

X.XX.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.176.777	2.176.777	2.800.777	0	PA D	
X.XX.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	4 paket	4.057.969	4.057.969	4.057.969	0	PA D	
X.XX.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1.870.000	1.870.000	2.576.362	706.362	PA D	
X.XX.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.050.300	3.050.300	1.520.000	-1.530.300	PA D	
X.XX.1. 2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	19.987.735	19.987.735	20.592.735	1.464.000	PA D	

X.XX.1. 2.06.9	Penyeleng- araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Suru- h Kec Suru- h	Desa Suru- h Kec Suru- h	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.629. 400	25.629. 400	23.566. 323	-2.243.169	PA D	
X.XX.1. 2.06.10	Penatausa- haan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Suru- h Kec Suru- h	Desa Suru- h Kec Suru- h	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokume- n	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokume- n	441.22 5	441.22 5	441.22 5	0	PA D	
X.XX.1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta- h Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	10.679. 000	10.679. 000	10.679. 000	0	PA D	
X.XX.01 .2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Suru- h Kec Suru- h	Desa Suru- h Kec Suru- h	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.679. 000	10.679. 000	10.679. 000	0	PA D	
X.XX.1. 2.08	Penyediaa- n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta- han Daerah			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	49.682. 800	49.682. 800	49.722. 800	0	PA D	

X.XX.1. 2.08.2	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	18.220. 000	18.220. 000	15.860. 000	0	PA D	
X.XX.1. 2.08.3	Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	2.250.0 00	2.250.0 00	2.250.0 00	0	PA D	
X.XX.1. 2.08.4	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	29.212. 800	29.212. 800	31.612. 800	0	PA D	
X.XX.1. 2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	38.509 .469	38.509 .469	41.348 .845	2.839.376	PA D	

X.XX.1. 2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	35.079.069	35.079.069	37.918.445	2.839.376	PA D	
X.XX.1. 2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	3.430.400	3.430.400	3.430.400	0	PA D	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	54.947.839	54.947.839	54.947.839	0	PA D	

7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan	21.801.350	21.801.350	21.801.350	0	PA D	
7.1.2.2.01.1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Desa Suruh Kecamatan Suruh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	21.801.350	21.801.350	21.801.350	0	PA D	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	14 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 laporan	33.146.489	33.146.489	33.146.489	0	PA D	

7.1.2.2.04.01	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 dokume n	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 dokume n	1.921.5 69	1.921.5 69	1.921.5 69	0	PA D	
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahk an	Desa Suru h Kec Suru h	Desa Suru h Kec Suru h	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	31.224. 920	31.224. 920	31.224. 920	0	PA D	
7.1.3	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN			Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	5.698.84 9	5.698.84 9	5.698.84 9	0	PAD	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa			Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan	5.698.84 9	5.698.84 9	5.698.84 9	0	PAD	

7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2 laporan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2 laporan	5.698.849	5.698.849	5.698.849	0	PAD	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	9.923.792	9.923.792	9.923.792	0	PAD	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	14 laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	14 laporan	9.923.792	9.923.792	9.923.792	0	PAD	

7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	8.292.701	8.292.701	8.292.701	0	PAD	
7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1.631.091	1.631.091	1.631.091	0	PAD	
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	7.422.475	7.422.475	7.422.475	0	PAD	

7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 laporan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 laporan	7.422.475	7.422.475	7.422.475	0	PAD	
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	3.413.733	3.413.733	3.413.733	0	PAD	
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa Suruh Kec Suruh	Desa Suruh Kec Suruh	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	4.008.742	4.008.742	4.008.742	0	PAD	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan - persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi sebagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para palaku (stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun agar dalam mengoperasionalkan RKPD lebih fokus dan terarah, disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suruh selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Suruh. Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyempurnakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Suruh. Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Suruh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

